

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu mengadakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan umum, seperti pembangunan jalanraya, pemukiman rakyat, pembangunan pasar tradisional, pembangunan gedung sekolah dan sebagainya.

Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan analisis dan kajian mengapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ada tiga faktor rendahnya mutu pendidikan, yaitu: pertama, pengelolaan pendidikan nasional dilakukan dengan birokratik-sentralistik, dimana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat atau dengan kata lain sekolah tidak memiliki otonomi. Kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, dan perbaikan sarana dan prasarana dipenuhi maka mutu pendidikan akan meningkat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua sangat minim.

Keberhasilan lembaga pendidikan tentunya tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Keikutsertaan tersebut dapat dilihat dari peran masyarakat yang terlibat dalam komite sekolah. Keberadaan komite sekolah pada dasarnya diatur dalam Undang-

Undang Pendidikan No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56 yang berbunyi komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan dan Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Komite Sekolah, yang mana komite sekolah dibentuk sebagai bagian dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan memiliki kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Artinya komite sekolah dalam hal ini bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang ada di sekolah. Untuk itu Komite Sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya mengurus dan mengatur pelaksanaan pelayanan pendidikan pada masing-masing sekolah. Dengan harapan Komite Sekolah dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana mestinya baik dalam sisi pengelolaan maupun pelayanan.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, komite sekolah berperan sebagai patner kepala sekolah baik dari pemberian pertimbangan maupun penentuan kebijakan disatuan pendidikan. Oleh karenanya Komite Sekolah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan di sekolah. Menurut Saiful Sagala (2009:35) partisipasi yang dimaksud mengandung tiga dimensi yakni konteks, tujuan dan lingkungan.

Partisipasi tersebut berkembang manjadi; partisipasi dalam mengambil kebijakan dan keputusan, partisipasi dalam melaksanakan, partisipasi dalam memperoleh keuntungan, dan partisipasi dalam mengevaluasi. Sementara menurut Mulyasa (2011:52) hubungan sekolah dan partisipasi masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana dalam membina dan menumbuhkan pribadi peserta didik

yang baik di sekolah. Hubungan tersebut diwakili oleh komite sekolah sebagai jembatan dalam memajukan kualitas pembelajaran, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat sekaligus menggairahkan masyarakat dalam menjalin hubungan dengan sekolah.

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang perlu diperhatikan komite sekolah adalah; 1) perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, hal ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan untuk menjamin semua komponen penyelenggaraan pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. 2) menentukan standar mutu layanan; yang dimaknai sebagai konsep yang digunakan dalam menetapkan standar mutu dari semua komponen pendidikan. 3) perubahan kultur yang bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu/kualitas sebagai orientasi semua komponen. 4) perubahan organisasi dalam konteks dinamikanya.

Adapun indikator kualitas pelayanan pendidikan yang dimaksud adalah; 1) Kualitas pembelajaran, yang berkaitan dengan kemampuan guru/ instruktur dalam penguasaan materi, keramahannya, objektivitas dalam memberikan nilai, dan sebagainya. 2) Bimbingan akademik, yang berhubungan dengan proses pembelajaran secara kontinu, kesabaran, ketelitian, dan ketersediaan waktu dalam memberikan bimbingan, dan sebagainya. 3) Sumber daya pendukung yang meliputi ketersediaan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan sebagainya. 4) Aktivitas ekstra kurikuler yang meliputi jumlah dan daya tarik berbagai aktivitas ekstra kurikuler, dukungan terhadap kegiatan, dan sebagainya. 5) Komunikasi dengan pimpinan, yang berkaitan dengan aspek kemudahan untuk menghubungi pimpinan/

staf program studi. 6) Aspek Pelayanan Administrasi, yang terdiri dari kemampuan dan kecepatan staf bagian administrasi pada tingkat atau program studi dalam memberikan pelayanan.

Kualitas layanan pendidikan menjadi suatu kepastian yang mesti dilakukan agar dapat bertahan dan tetap mendapat kepercayaan di masyarakat. Menurut Tjiptono (2011:59), kualitas pelayanan di sini merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan untuk memenuhi keinginan konsumen. Sedangkan Lewis (2010:78) menyatakan bahwa kualitas layanan diukur berdasarkan ekspektasi konsumen. Artinya kualitas layanan adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh konsumen agar pihak penyedia layanan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari setiap pelanggan.

Selain itu manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berperan sebagai; 1) Pemberi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan. 2) Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. (Hasbullah,2006:92)

Manajemen Sekolah bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Dengan adanya Manajemen pengelolaan Komite di sekolah diharapkan :

1. Dapat meningkatkan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan

- mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
2. Dapat meningkatkan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.
 3. Dapat meningkatkan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu

Karena pentingnya keberadaan Komite Sekolah di Suatu Lembaga sekolah maka perlu dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan Komite Sekolah sebagai suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Tata Kelola Komite sekolah dengan menggunakan Teori Manajemen. Tanggung jawab sekolah dalam *School Based Manajement* atau manajemen berbasis sekolah bukan hanya sekedar proses, tetapi juga tanggungjawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa hambatan yang harus dibenahi terutama terletak dalam pemberdayaan komite sekolah yang kurang mampu bekerja optimal dalam peranannya terkait proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian Manajemen Komite sekolah menjadi sangat menarik untuk untuk diteliti dalam rangka penyusunan Tesis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Ketika seorang peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti maka langkah selanjutnya adalah mendesak adanya suatu identifikasi masalah dari suatu fenomena yang tengah diamati tersebut. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau *measurable* sebagai langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah kemudian adalah mendefinisikan masalah penelitian.

Dengan demikian keberadaan komite sekolah semestinya dapat menghadirkan pelayanan terbaik dari sisi manajemen sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, akan tetapi pada kenyataannya tidak banyak komite sekolah yang dapat berperan sebagaimana mestinya. Hal ini terungkap dari hasil observasi penulis yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, yang menemukan bahwa keberadaan komite sekolah justru jauh berbeda dengan konsep atau teori yang ada. Yang mana keberadaan komite sekolah sebagai jembatan antara masyarakat dan sekolah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat, misalnya dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah yang tanpa pertimbangan dan dukungan dari komite sekolah sebagai kontrol dan mediator antara institusi di satuan pendidikan dan masyarakat.

Untuk itu penelitian ini bermaksud menjawab bagaimana manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Adapun yang

menjadi alasan dipilihnya lokasi penelitian; Pertama karena pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan belum optimal sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk mensekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah angka peserta didik dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Kedua karena keberadaan sekolah yang mudah dijangkau dan aksesnya tidak jauh dari kediaman peneliti.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas. Penelitian ini memfokuskan pada persoalan komite sekolah yang meliputi unsur manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi. Keberadaan komite sekolah pada hakikatnya dibentuk agar dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang ada dalam sekolah. Untuk itu optimalisasi manajemen komite sangat dibutuhkan agar kualitas layanan yang dihasilkan menjadi baik. Terutama pelayanan yang menyangkut proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada masalah Manajemen Komite dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

1.4. Perumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan penelitian dan memperjelas permasalahan yang hendak dibahas sehingga sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah serta mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk

hubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan manajemen komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan?
3. Apa upaya yang dilakukan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan?

1.5. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana penerapan manajemen komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
3. Mengetahui apa upaya yang dilakukan komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari Penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis agar dapat menambah wawasan keilmuan tentang manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- b. Bagi sekolah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap penerapan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- c. Bagi komite sekolah dapat dijadikan masukan dan saran sebagai referensi terkait penerapan manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dan penelitian ini adalah :

- a. Mengembangkan teori manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan .
- b. Memperkaya referensi keilmuan pendidikan dan sumber informasi dan kajian akademik.
- c. Pengembangan penelitian di bidang manajemen komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Rejosari I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.